

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS

T Heru Nurgiansah¹, Titik Mulyati Widyastuti²
nurgiansah@upy.ac.id¹, titik@upy.ac.id².
Universitas PGRI Yogyakarta^{1,2}

ABSTRACT

As the State of the law was supposed to Indonesia Citizens obedient and well behaved on the applicable legislation. Students as agents of change are part of the citizens must obey the rules. Obedience and good legal compliance will only occur if the understanding and knowledge of the law that well and this can only be in the form of through legal education. One of the roles and functions of the civic education was as a legal education. It is aligned with the goals of civic education that is forming good citizens. One of the indicators of good citizens are aware of the law, it means to know, understand, and obey the rule of law, one being traffic rules regulated by law number 22 of the year 2009 about traffic and Road Transport. The purpose of this research is to build awareness of PPKN student from University of PGRI Yogyakarta. This research used the qualitative approach with its data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques through the reduction of data, display data, and verification. The results of this research are valid existence of synchronization between civic education courses with the role of professors and institutions in building awareness of the traffic law PPKN student from University of PGRI Yogyakarta.

Keyword: *Legal Education, Civic Education*

ABSTRAK

Sebagai negara hukum sudah seharusnya Warga Negara Indonesia taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahasiswa sebagai agen perubahan merupakan bagian dari warga negara yang harus taat pada aturan. Ketaatan dan kepatuhan hukum yang baik hanya akan terjadi apabila pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum tersebut baik dan hal ini hanya bisa di bentuk melalui pendidikan hukum. Salah satu peran dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan hukum. Hal ini selaras dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik atau “to be a good citizenship”. Salah satu Indikator warga negara yang baik adalah sadar hukum, artinya mengetahui, memahami, dan mentaati peraturan hukum, salah satunya peraturan lalu lintas yang diatur oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun kesadaran hukum mahasiswa PPKn Universitas PGRI Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya melalui reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya sinkronisasi antara mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peran dari dosen dan lembaga dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas mahasiswa PPKn Universitas PGRI Yogyakarta.

Kata Kunci: *Pendidikan Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya roda dua semakin meningkat. Hal ini menyebabkan permasalahan lalu lintas berupa kemacetan. Fakta di lapangan tidak hanya masalah kemacetan saja yang terjadi, akan tetapi angka kecelakaan pun cukup tinggi. Berawal dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang aturan lalu lintas maka pelanggaran lalu lintas menjadi sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Padahal dari pelanggaran tersebut kecelakaan lalu lintas bermula.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh ruas jalan yang tidak memadai seperti jalan berlubang, sempit, dan minimnya ketersediaan lampu penerangan jalan di malam hari, serta perilaku pengendara yang tidak patuh hukum dengan berkendara ugal-ugalan, tidak memiliki surat ijin mengemudi, dan tidak melengkapi kelengkapan kendaraan. Hal ini selaras dengan pendapat Suananta dkk (2015) yang mengatakan bahwa pembangunan di bidang infrastruktur yang tak berbanding lurus dengan angka pertumbuhan kendaraan adalah salah satu faktor semakin meningkatnya angka kecelakaan di jalan raya. Sedangkan menurut Ridho (2016) mengatakan bahwa bertambahnya jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan bertambahnya sarana dan prasarana jalan raya dapat menyebabkan permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Selain masalah kemacetan dan kecelakaan, masalah lainnya adalah banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Rata-rata pelanggarnya adalah anak remaja generasi milenia yang oleh orang tuanya diberikan fasilitas kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua untuk moda transportasinya tanpa mempertimbangkan berbagai aspek penunjang lainnya terutama dari sisi perkembangan psikologis anak.

Rendahnya kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas terlihat dari tingginya pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa PPKn di Universitas PGRI Yogyakarta, ditemukan berbagai macam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, seperti tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI), kemudian tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, menggunakan knalpot bising, tidak melengkapi STNK dan SIM.

Pelanggaran lalu lintas tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, baik karena kurangnya kesadaran hukum pengguna jalan, maupun standar kelengkapan dari kendaraan itu sendiri. Perlu adanya pemberian pemahaman kepada pelaku pengendara khususnya mahasiswa tentang pentingnya tertib lalu lintas agar kesadaran hukum dalam berlalu lintas semakin membaik dan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Anita (2015) mengatakan bahwa permasalahan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas akan tetap meningkat jika kesadaran hukum masyarakatnya untuk tertib berlalu lintas belum diwujudkan secara maksimal. Kesadaran hukum tidak hanya dapat diukur dari seberapa besar pengetahuan tentang hukum, tetapi juga seberapa baik perilaku yang tergambar dari kepribadian seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Hal terpenting dalam berlalu lintas bagi pengendara remaja adalah kesadaran hukumnya yang harus tertanam dalam hati sanubari. Kesadaran dalam berlalu lintas dapat tumbuh jika aturan tersebut diketahui, dipahami, dan ditaati. Tertib berlalu lintas sangat penting bagi pengendara kendaraan. Elemen ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik orang tua, dosen, lembaga perguruan tinggi, maupun dari pihak aparat penegak hukum. Sadono (2016) mengatakan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah melakukan kegiatan sosialisasi peraturan tentang pemakaian atau penggunaan kendaraan yang baik, aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna kendaraan lainnya.

Tak hanya pihak kepolisian yang harus gencar menangani permasalahan ini. Perguruan Tinggi pun memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswanya agar dapat menaati peraturan lalu lintas. Selain dari pihak kampus dan kepolisian, tak kalah penting adalah sosok dosen yang harus memberikan keteladanan yang baik dalam membimbing, memantau dan mengarahkan mahasiswanya agar berperilaku sesuai dengan aturan.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sebuah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena bermula dari realita di lapangan dan juga berawal dari peristiwa yang terjadi di lapangan yaitu bahwa peneliti telah menemukan suatu permasalahan tentang kesadaran hukum mahasiswa yang rendah. Menurut Sugiyono (2012: 8) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (Natural Setting).

Dengan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, peneliti bisa fokus pada perhatian dan juga kejadian yang alamiah yang terjadi dan dialami mahasiswa dalam penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu, peneliti juga bisa melakukan pengamatan sendiri, wawancara langsung, dan mengungkapkan berbagai macam data yang diperoleh. Menurut Indrawan (2014: 68) mengatakan bahwa pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian, poses pengumpulan dan analisis data bersifat kasus pula.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di kampus unit 2 Jl. PGRI II Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan terhadap Dosen dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan

Pancasila Dan Kewarganegaraan. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan gambar mahasiswa di gerbang masuk parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta beralamat di Jl. PGRI II Sonosewu Kelurahan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Terakreditasi "A" berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 4592/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017. Memiliki 7 (tujuh) orang dosen tetap dan 142 orang mahasiswa.

1. Peran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas mahasiswa PPKn UPY.

Salah satu capaian Kompetensi Lulusan Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi menurut Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi point 8 mengatakan bahwa mahasiswa dituntut untuk taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan landasan ini mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa untuk mentaati segala peraturan yang berlaku dalam berbagai segi kehidupan terutama taat pada aturan lalu lintas. Fungsi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan juga adalah sebagai pendidikan hukum, artinya mahasiswa dibekali pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum agar dapat mentaatinya. Sebagai pendidikan hukum maka output yang dihasilkan adalah mahasiswa memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya adalah mahasiswa mengetahui batasan-batasan hak dan kewajiban dalam berkendara di jalan raya.

Maftuh dan Sapriya (2005: 321) yang mengatakan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pensosialisasian hukum dalam jenjang pendidikan formal yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Menurut Syaifullah dan Wuryan (2008:23) mengatakan:

"Peran dan fungsi PKn dalam kaitannya untuk membentuk kesadaran hukum siswa adalah menciptakan dan membina ketertiban hidup siswa di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh siswa dengan cara mentaati segala aturan hukum yang berlaku di negara kita. Setiap siswa sebagian dari warga negara tersebut dituntut memiliki kesadaran hukum agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman dan damai."

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter.

2. Peran dosen dan lembaga perguruan tinggi dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas mahasiswa PPKn UPY.

Di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen disebutkan bahwasanya Dosen adalah seorang tenaga pendidik profesional dan juga seorang ilmuwan dengan tugas utamanya yaitu untuk melakukan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugasnya sebagai seorang pendidik mengharuskan dosen untuk dapat mengarahkan dan membentuk sikap perilaku serta karakter mahasiswanya ke arah yang lebih baik. Peran seorang dosen sebagai pendidik diantaranya adalah sebagai informator. Dosen harus bertindak sebagai informan yang mempunyai dan menguasai berbagai macam informasi khususnya mengenai peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dalam hal ini diatur oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Informasi ini harus dapat disampaikan dan ketahu oleh mahasiswanya agar ketertiban dalam berlalu lintas dapat tercapai.

Yang kedua adalah seorang dosen harus mampu menjadi motivator bagi para mahasiswanya untuk mentaati peraturan lalu lintas. Ini dapat dilakukan dengan memberikan keteladanan yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan panutan bagi mahasiswa. Fakta dilapangan yang terjadi adalah perilaku meniru dari mahasiswanya hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa PPKn UPY bahwa alasan tidak menggunakan helm karena dosennya pun tidak memakai helm.

Selanjutnya adalah peran lembaga yang dalam penelitian ini adalah Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Yang pertama perlu adanya kerja sama dengan Instansi lain terutama Kepolisian untuk menertibkan mahasiswa yang kurang disiplin dalam berlalu lintas. Bentuk kerjasama ini adalah sosialisasi dengan cara mengadakan workshop atau pelatihan secara rutin bagi mahasiswa PPKn UPY tentang penerapan UU No 22 Tahun 2002 agar mahasiswa mengetahui hak dan kewajibannya dalam berlalu lintas.

Selanjutnya yang bisa dilakukan oleh lembaga adalah kerja sama dengan pihak keamanan setempat dalam hal ini

security untuk membantu menertibkan perilaku mahasiswa dengan cara melarang parkir di area kampus apabila kedapatan secara kasat mata tidak menggunakan helm berstandar Indonesia dan berboncengan lebih dari dua orang. Kemudian pemeriksaan kelengkapan berkendara meliputi SIM, STNK, Lampu Kendaraan, Knalpot, dll. Lalu penertiban parkir kendaraan yang rapih akan menggugah kesadaran mahasiswa untuk mentaati peraturan yang berlaku.

3. Kendala dan Solusi dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas mahasiswa PPKn UPY.

Kendala pertama adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan hanya berbobot 2 SKS saja dan materi tentang hukum berlalu lintas jarang disinggung dan dibahas sekalipun mayoritas mata kuliah di Program Studi PPKn adalah tentang hukum. Dosen dan lembaga masih belum proaktif dalam menyadarkan perilaku mahasiswa terkait pentingnya kesadaran berlalu lintas. Kemudian belum terciptanya sinergi antara dosen dan lembaga di dalam merumuskan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi sehingga timbul kesan kurangnya kekompakan antara dosen dan lembaga yang seolah-olah terjadi pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya kurangnya kesadaran dari dalam diri mahasiswa bahwa ketertiban dalam berlalu lintas bersifat mutlak karena mengatur antar hak dan kewajiban diantara pengguna jalan.

Solusinya adalah perlu adanya peningkatan kerja sama antar semua pihak terutama dengan aparat penegak hukum dalam pensosialisasian undang-undang tentang lalu lintas. Perlu ketegasan dalam penindakan bagi para pelanggar agar dapat memberikan efek jera sehingga kesalahan tersebut tidak dilakukan berulang-ulang.

KESIMPULAN

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu mahasiswa PPKn UPY semester 2 mampu membangun kesadaran hukum berlalu lintas dikarenakan kurikulum dalam mata kuliah tersebut memuat tentang pendidikan hukum. Lembaga dan Dosen pengajar di UPY khususnya di prodi PPKn telah berusaha mengingatkan dan menyadarkan mahasiswa akan pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas. Adapun kendala di dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas mahasiswa PPKn UPY tidak terlalu berat hanya diperlukan keseriusan dari semua pihak untuk bekerja sama secara berkesinambungan dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa agar menjadi warga negara yang baik, mahir, terpuji dan patuh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Angelika R (2015). *Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Tabrak Lari*. Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Indrawan, Rully. & Yaniawati, Poppy. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Ridho, Habid (2016). *Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Suananta, Wijaya, & Mardiyono (2015). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Surabaya*. Universitas Brawijaya Malang
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Wuryan, Sri. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS)*. Bandung: Laboratorium PKN UPI

